

LAPORAN KINERJA TAHUN

2021



Gedung Diskominfo Banjarbaru
Jl. Pangeran Suriansyah No.5, Kel. Komet,
Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, 70711
Kalimantan Selatan



kominfobjb@banjarbarukota.go.id



(0511) 6749126

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru diatur melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/Kelemahan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru menyusun Laporan Kinerja tahun 2021. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2021.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2.Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) dibuat dalam rangka mewujudkan administrasi kepegawaian yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mempraktekan prinsip-prinsip *Good Governance*, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *Public Good and service* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai salah satu sarana yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau Kelemahan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2021 serta memperkuat peran dan kapasitas institusi parlemen dengan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dan telah diubah melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Statistik dan Persandian.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika.
- e. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika.

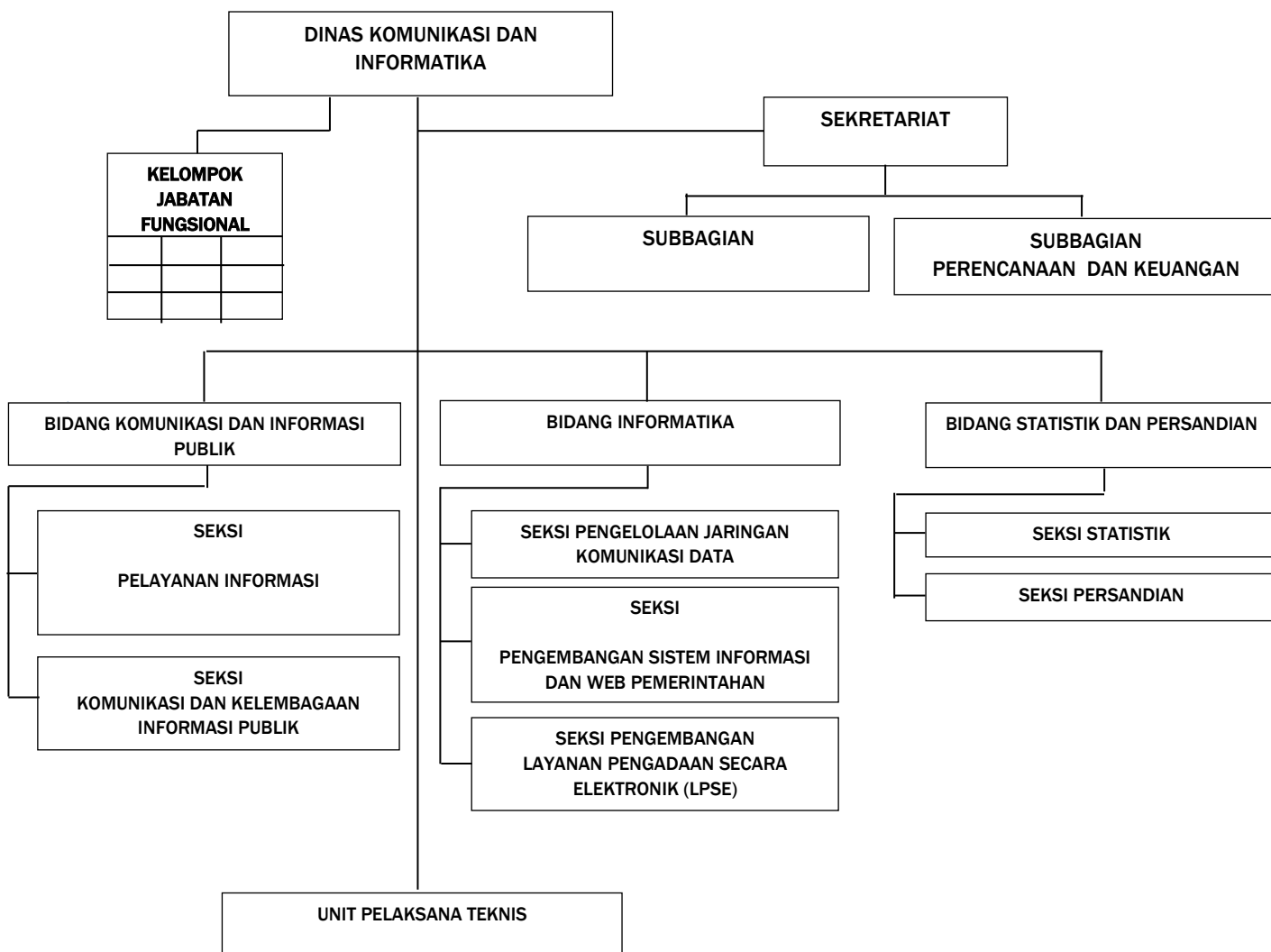
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan peraturan tersebut, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Informasi
 - b. Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik
3. Bidang Informatika, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Web Pemerintah
 - c. Seksi Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
4. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi;
 - a. Seksi Statistik
 - b. Seksi Persandian
5. Kelompok Jabatan Fungsional



Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru didukung oleh 64 orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
Akhir Tahun 2021

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	:	32 orang
Tenaga Kontrak	:	28 orang
Dengan posisi / jabatan sebagai berikut:		
Kepala Dinas (ess. IIb)	:	1 orang
Sekretaris Dinas (ess. IIIa)	:	1 orang
Kabid (ess. IIIb)	:	3 orang

Kasubbag (ess. IVa)	:	2 orang
Pejabat Fungsional Tertentu	:	13 orang
Staf PNS / Tenaga Kontrak	:	28 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan									
SD	SMP	SMA	DI	DIII	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-	-	6	-	4	-	20	2	-	32

Jumlah Tenaga Kontrak Menurut Pendidikan									
SD	SMP	SMA	DI	DIII	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-	1	6	2	2	-	17	-	-	28

Jumlah PNS Menurut Golongan/Kepangkatan																			
Golongan I					Golongan II					Golongan III					Golongan IV				
A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh
							1	4		3	5	1	4		1	1	1		
												2							32

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah menangani isu strategis terkait **Belum Optimalnya Fasilitas Teknologi Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Informasi Publik**, yaitu dengan "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah" yang merupakan misi ketiga Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi”.

1.5. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Untuk itu, terdapat beberapa permasalahan yang berasal dari dalam/internal maupun dari luar/eksternal yaitu:

- Belum semua unit kerja memiliki jalur konektisitas
- Masih kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat
- Masih belum meratanya pelayanan informasi kepada masyarakat
- Masih kurangnya sarana Komunikasi dan Informatika

- e. Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi
- f. Terbatasnya tenaga teknis bidang IT
- g. Masih kurang diberdayakannya Kelompok Informasi Masyarakat
- h. Belum tersedianya *data center* yang melayani penyimpanan data digital bagi SKPD yang berada dalam jaringan intranet yang merupakan *common data base system* informasi bagi semua entitas
- i. Masih banyak unit kerja yang belum memanfaatkan secara maksimal ketersediaan sub domain *banjarbarukota.go.id*
- j. Bandwidth internet terpusat yang dikelola oleh Diskominfo besarnya belum memadai
- k. belum ada jalur *backup* jaringan internet di Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru
- l. Infrastruktur Jaringan belum menerapkan mekanisme *Firewall* dan *Proxy server* untuk memberikan keamanan akses internet
- m. Keamanan infrastruktur baru ditetapkan secara terbatas
- n. Banyak infrastruktur yang informasi penting dan kemampuan pengelolaannya masih diserahkan ke pihak ketiga tanpa ada tenaga ahli yang memadai dari pihak internal Pemerintah Kota Banjarbaru, sehingga jika terjadi masalah dengan pihak ketiga, menimbulkan potensi terganggunya layanan infrastruktur.
- o. penggunaan infrastruktur juga masih ada yang belum optimal, misalnya beberapa server hanya diisi dengan aplikasi website saja, belum dimanfaatkan untuk server penyimpanan aplikasi transaksi operasional pemerintahan.
- p. PPID yang telah terbentuk belum dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung terwujudnya Keterbukaan Informasi sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008

Selain itu, paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek

akuntabilitas, transparansi dan partisipatif membawa konsekuensi pada perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan, dimana Pemerintah tidak lagi berperan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan memberikan peluang seluas-luasnya dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (*society participation*) dalam proses pembangunan bangsa.

Pemerintah meyakini bahwa konsep kota pintar (*Smart City*) dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan pembangunan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi informasi. Untuk itulah guna memperkuat peran ICT sebagai *enabler* di semua pilar *smart city* dalam menciptakan ekosistem *smart city*, khususnya pada sektor strategis yang dimiliki oleh masing-masing daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kemendagri, Kementerian PAN & RB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU & PR, Kantor Staf Presiden serta Kompas Gramedia menyelenggarakan Gerakan Menuju 100 *Smart City*. Targetnya, hingga tahun 2019 akan ada 100 daerah (25 kabupaten/kota (2017), 50 kabupaten/kota (2018) yang menjadi *role model* dalam implementasi program *smart city*. Kota Banjarbaru, termasuk dalam 100 kabupaten/kota yang terpilih sebagai *role model*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berperan sebagai *leading sector* dalam implementasi *smart city*. Pemerintah Kota Banjarbaru telah melaksanakan kegiatan implementasi *smart city* sesuai dengan jangka pendek dan jangka menengah masterplan *smart city* yang dibuat tahun 2018.

Selain itu, Bidang komunikasi dan informatika telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar. Media komunikasi yang dikembangkan dengan dukungan teknologi sudah begitu maju dan mudah didapat oleh masyarakat, Meski demikian **masih banyak warga masyarakat yang belum akrab dengan media-media tersebut** dan masih membutuhkan media informasi yang diselenggarakan dalam bentuk konvensional seperti dialog interaktif, siaran

keliling, sosialisasi dan pertunjukan rakyat, pada tahun 2021 sudah ada penyebaran informasi melalui media Banjarbaru TV.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan tantangan bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksakannya. Dalam hal ini hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik mulai perencanaan, proses pembuatan sampai pelaksanaannya dijamin oleh Undang-Undang. Dan menjadi wajib hukumnya bagi pelayan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tantangan yang harus memperoleh perhatian adalah mempersiapkan diri baik bagi aparatur secara individu maupun kelembagaan dan mendorong tumbuhnya kesiapan dari semua pihak, baik kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat secara umum.

Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah;

1. Terwujudnya Banjarbaru Smart City melalui strategi pelayanan berbasis **Information Communication Technology (ICT)** yang terintegrasi dengan arah kebijakan integrasi pelayanan di seluruh instansi pemerintahan
2. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan
3. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota
7. Penguatan jalur koneksitas antar unit kerja
8. Peningkatan implementasi e-Government Pemerintah Kota;

9. Pengembangan pusat data yang aman dan handal;
10. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan;

1.6. Keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada tahun 2021 mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar **14.375.389.682,-** (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rincian Anggaran dan Realisasi APBD

Jenis Belanja		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja	
			Jumlah	%
Belanja Operasi	Belanja Pegawai	3.395.806.663	3.200.153.453	94,24
	Belanja Barang dan Jasa	7.098.272.160	6.417.774.959	90,41
Belanja Modal		5.257.951.000	4.757.461.270	90,48
TOTAL		15.752.029.823	14.375.389.682	91.26

1.7. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, struktur organisasi secara singkat, aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dan perjanjian kinerja tahun 2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan pertanggungjawaban kinerja yang terdiri dari capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Capaian kinerja tahun bersangkutan;
2. Membandingkan kinerja 3 tahun terakhir;
3. Perbandingan kinerja dengan kabupaten / kota / propinsi
4. Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah dan nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/Kelemahan
6. Efisiensi penggunaan sumber daya dan program/kegiatan menunjang

Pada Bab ini juga diuraikan analisis penyebab keberhasilan/Kelemahan maupun peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kelemahan pencapaian pernyataan kinerja, beserta realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan

pernyataan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, kendala dalam pelaksanaan serta langkah-langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang

2.1. Perencanaan Strategis

Sebagai penjabaran dari Visi Kota Banjarbaru yaitu “**Mewujudkan Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera (JUARA)** “ maka Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Misi Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia
2. Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berperan pada misi ke 3 yaitu : “ **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah** ”

Pada misi ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru menunjang

Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

Untuk mencapai misi ketiga Pemerintah Kota Banjarbaru, maka strategi dan arah kebijakan yang dibuat dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera (JUARA)			
MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Diskominfo	1. Meningkatkan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Meningkatkan Pelayanan Internal Diskominfo	Peningkatan nilai SAKIP
			Penyediaan dokumen perencanaan tepat waktu
			Penyediaan laporan keuangan dan aset tepat waktu
			Meningkatkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti
			Terlaksananya pemenuhan kebutuhan internal (listrik, air, telekomunikasi, makan-minum, ATK, pemeliharaan peralatan/perlengkapan gedung, mobil jabatan/kendaraan operasional, bahan bacaan dan perundang-undangan, jasa non PNS, jasa kebersihan, barang cetakan, rapat koordinasi dan konsultasi, dll)
Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dengan teknologi informasi dan komunikasi	1.2. Meningkatkan kualitas layanan publik	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penatalaksanaan dan Penngawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penatalaksanaan dan Pengawasan Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			Meningkatkan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

			Meningkatkan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Meningkatkan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas
			Melaksanakan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan SDM TIK Aparatur
	1.3 Meningkatnya informasi publik	Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Monitoring opini dan aspirasi publik
			Meningkatkan pengelolaan media komunikasi publik
			Meningkatkan pelayanan informasi publik
			Melaksanakan Penguatan Kapasitas SDM Komunikasi Publik
			Meningkatkan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas
	1.4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral
			Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral
			Meningkatkan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
	1.5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi	Melaksanakan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan SDM keamanan informasi Pemerintah Daerah
			Menetapkan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
			Meningkatkan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah berbasis Elektronik dan Non Elektronik

			Meningkatkan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
--	--	--	--

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru selama 5 tahun anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN (Misi 3 RPJMD)	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINE RJA PADA AWAL PERIO DE RPJM D	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah								
	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Aspek SPBE	n/a	2	2,1	2,2	2,3	2,4
		Meningkatnya Informasi Publik	Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah	n/a	80%	90%	100 %	100 %	100%
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik	n/a	70%	75%	80%	85%	90%

		Sektoral	Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerahpersandian Diskominfo						
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	n/a	30%	35%	40%	45%	50%

2.2 Strategi Dan Kebijakan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Misi 1. Meningkatnya kualitas layanan publik

Strategi :

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan :

1. Meningkatkan Penatalaksanaan dan Penngawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan Penatalaksanaan dan Pengawasan Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Meningkatkan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
5. Meningkatkan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

6. Meningkatkan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas
7. Melaksanakan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan SDM TIK Aparatur

Program :

Program Aplikasi Informatika

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Kegiatan :

1. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Misi 2. Meningkatnya informasi publik

Strategi :

Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan :

1. Melaksanakan Monitoring opini dan aspirasi publik
2. Meningkatkan pengelolaan media komunikasi publik
3. Meningkatkan pelayanan informasi publik
4. Melaksanakan Penguatan Kapasitas SDM Komunikasi Publik

5. Meningkatkan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas

Program :

Informasi Dan Komunikasi Publik

Kegiatan :

Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Dearah

Sub Kegiatan :

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3. Pelayanan Informasi Publik
4. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
5. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan

Misi 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral

Strategi :

Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan :

1. Membangun Metadata Statistik Sektoral
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral
3. Meningkatkan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Program :

Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan :

Penyelenggaraan Statistik sektoral daerah Kabupaten/Kota

1. Membangu Metadata Statistik Sektoral

2. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral
3. Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Misi 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi

Strategi :

Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi

Kebijakan :

1. Melaksanakan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan SDM keamaan informasi Pemerintah Daerah
2. Menetapkan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah berbasis Elektronik dan Non Elektronik
4. Meningkatkan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Program :

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan :

Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

1. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah kabupaten/kota
2. Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
3. Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

4. Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik

2.3. Perjanjian Kinerja 2021

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 20201 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2021 telah ditetapkan dan dimuat dalam Penetapan Kinerja Kota Banjarbaru.

Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.3

Perjanjian Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Ket
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintah menggunakan TIK	1. Nilai Aspek SPBE	3,5	
Meningkatnya konektivitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	1. Prosentase unit kerja yang penyelenggaraan pemerintahan menggunakan koneksi jaringan Diskominfo	100%	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	1. Prosentase SKPD yang telah menggunakan layanan persandian Diskominfo 2. Prosentase unit kerja yang telah menggunakan layanan LPSE 3. Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti menggunakan aplikasi lapor	100% 100% 100%	
Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	1. Prosentase perberdayaan KIM 2. Prosentase informasi pembangunan Kota Banjarbaru yang dapat diakses skala regional/nasional 3. Prosentase isu publik yang dijadikan bahan analisis kebijakan pimpinan 4. Prosentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui website SIP-PPID 5. Prosentase data/informasi statistik sektoral yang update	100% 100% 100% 100% 100%	

Tabel : 2.4

Perjanjian Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Ket
Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai Aspek SPBE	2	
Meningkatnya informasi publikmenggunakan TIK	Persentase informasi publik pemerintah daerah	80%	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Prosentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	70%	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Prosentase tingkat keamanan informasi pemerintah	30%	

1. Meningkatnya kualitas layanan publik

Indikator Kinerja adalah Nilai Aspek SPBE yaitu perhitungan nilai aspek spbe diperoleh berdasarkan nilai rata-rata jumlah tingkat kematangan masing-masing indicator spbe yang diukur dari 0 sampai dengan 5 sesuai dengan permenpan no 59 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Indikator spbe yang dimaksud adalah 20 indikator spbe yang menjadi tanggung jawab dinas komunikasi dari 35 total indokator spbe yang ada, yaitu : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah, Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE, Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data, Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah, Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data, Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka.

2. Meningkatnya informasi publik

Indikator kinerjanya adalah Persentase informasi publik pemerintah daerah yaitu Jumlah informasi per bulan di bagi jumlah informasi setahun kali 100 persen.

3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral

Indikator kinerjanya adalah Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yaitu Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah SKPD dikali 100 persen.

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi

Indikator kinerjanya adalah Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah yaitu Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian di kali 100 persen Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian di kali 100 persen

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru mendapat dukungan dana (murni dan perubahan) sebesar **Rp. 10.188.383.300** (Sepuluh Miliar Tujuh Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,133,740,500
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,133,740,500
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp 86,772,000
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 367,199,000
Pelayanan Informasi Publik	Rp 52,129,000
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 145,363,000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp 482,277,500
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 8,760,294,300
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5,274,308,000
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 66,399,000
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 5,207,909,000
Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,485,986,300
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 53,291,000
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp 2,529,632,800
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 492,240,500

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp 353,357,000
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 57,465,000
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 112,981,500
Penyelenggaraan Statistik sektoral daerah Kabupaten/Kota	Rp 112,981,500
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 30,660,500
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp 82,321,000
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 181,367,000
Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp 181,367,000
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 31,038,500
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 150,328,500
Total	Rp 10,188,383,300

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB

3

Tabel 3.1 Realisasi Kinerja berdasarkan Renstra 2016-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	TRIWULAN					
			TARGET	REALISASI I	TARGET	REALISASI II	TARGET	REALISASI III
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Nilai Aspek SPBE	3,5	0	0	0	0	-	-
Meningkatnya konektivitas penyelenggaraan pemerintah TIK	Prosentase unit kerja yang penyelenggaraan pemerintahan menggunakan koneksi jaringan Diskominfo	100%	0	0	0	0	-	-
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah TIK	Prosentase SKPD yang telah menggunakan layanan persandian Diskominfo	100%	0	0	50	63.5	50	37.5
	Prosentase unit kerja yang telah menggunakan layanan LPSE	100%	10	6.25	35	25	5	3.13
	Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti menggunakan aplikasi LAPOR!	100%	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Prosentase perberdayaan KIM	100%	0	0	50	50	0	0
	Prosentase informasi pembangunan kota Banjarbaru yang dapat diakses skala regional/ nasional	100%	100	45.03	100	38.10	100	30.11

	Prosentase isu publik yang dijadikan bahan analisis kebijakan pimpinan	100%	100	55.24	100	45.16	100	73.33
	Prosentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui website SIP-PPID	100%	50	55	20	11	10	5
	Prosentase data/informasi statistik sektoral yang update	100%	0	0	50	50	50	50

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang telah dibuat di tahun 2021. Dalam BAB ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2021.

Penyajian laporan pertanggungjawaban ini dbuat sesuai dengan ketentuan yang diamatkan dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Diskominfo Kota Banjarbaru diuraikan berdasarkan sasaran sebagai berikut :

❖ **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan publik**

Indikator : Nilai Aspek SPBE

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur

negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Secara konsep, tingkat kematangan SPBE dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang nantinya mengukur derajat pengembangan SPBE.

Untuk mengukur tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK, digunakan nilai aspek SPBE. **Perhitungan nilai aspek SPBE diperoleh berdasarkan nilai rata-rata jumlah tingkat kematangan masing-masing indikator SPBE yang di ukur dari 0 sampai dengan 5 sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020.**

Alasan pemilihan indikator ini adalah karena nilai Aspek SPBE menggambarkan tingkat kematangan (Maturity level) pelaksanaan SPBE. Aspek SPBE mencakup banyak aspek seperti kebijakan tata kelola, kebijakan layanan SPBE, kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi, administrasi dan pemerintahan dan serta layanan publik.

Tabel 3.2 INDIKATOR ASPEK SPBE DISKOMINFO KOTA BANJARBARU

NO	Indikator
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
Aspek 2 - Perencanaan Strategis SPBE	
10	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
11	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	
12	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
13	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data
14	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
15	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah
16	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	
17	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
18	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	
19	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
20	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka

Nilai aspek SPBE yang menjadi indikator kinerja Diskominfo ada pada domain Tata Kelola yaitu TIK. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE 2021 oleh KemenPANRB aspek TIK Kota Banjarbaru memperoleh nilai 2,2 dengan predikat Cukup.

a. Target Realisasi dan Capaian 2021

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Aspek SPBE	Indeks	2	2,2	110%

3.4 Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

NO	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3

Aspek 2 - Perencanaan Strategis SPBE		
10	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
11	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		
12	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
13	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
14	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
15	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	2
16	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		
17	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
18	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik		
19	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
20	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
	Rata-rata	2,2

Nilai aspek SPBE (TIK) Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2021 adalah 2,2. Hal ini di atas target yang telah dibuat yaitu 2, karena itu capaian kinerja di tahun 2021 adalah 110%.

b. Perbandingan Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 3.5 Perbandingan Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan 2019

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2019		Realisasi 2020		Realisasi 2021	
		Realisasi	Capaian	Reliasai	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Aspek SPBE	Na	Na	Na	Na	46,87%	156,23%

Bila dibandingkan dengan nilai aspek SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2020 sebesar 2,81 maka di tahun 2021 nilai aspek SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru mengalami penurunan sebesar 0,61 menjadi 2,2 disebabkan karena perubahan penilaian indikator.

c. Perbandingan RPJMD dan Nasional

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional Tahun 2021
1.	Nilai Aspek SPBE	2,2	2,75	2,6

Bila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021, nilai aspek SPBE (TIK) Kota Banjarbaru sebesar 2,2 di tahun 2021 masih dibawah target RPJMN yang ditetapkan dan lebih rendah 0,55 poin dan masih rendah target nasional yang ditetapkan dan lebih rendah 0,4 poin.

Mengingat evaluasi SPBE dilakukan setiap tahun, maka sangat penting untuk terus menjaga konsistensi bahkan meningkatkan upaya perbaikan agar di tahun-tahun mendatang hasil evaluasi SPBE Kota Banjarbaru semakin baik.

d. Perbandingan dengan Provinsi

Tabel 3.7 Perbandingan Kinerja dengan Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Provinsi Kalimantan Selatan
1.	Nilai Aspek SPBE	2,2	2,60

Nilai aspek SPBE (TIK) Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2021 adalah 2,2 dibanding dengan aspek SPBE Provinsi Kalimantan Selatan rendah dengan 2,60.

e. Perbandingan dengan Kab/Kota Sekitar

Tabel 3.8 Perbandingan dengan Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjar Masin
1.	Nilai Aspek SPBE	2,2	-	-	-

Nilai aspek SPBE (TIK) Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2021 adalah 2,2. Masing-masing Kab/Kota sekitar tidak sama penetapan indikatornya dengan Kota Banjarbaru.

f. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Hal yang mendorong keberhasilan capaian kinerja adalah:

1. Pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Layanan Pusat Data dan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Banjarbaru. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Walikota Banjarbaru no 5 Tahun 2018 sebagai dasar hukum penerapan pengelolaan dan pembangunan layanan pusat data dan jaringan intra. Selain itu, keunggulan juga dapat dilihat pada Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Walikota Banjarbaru no 188.45/307/KUM/2020 tentang Tim Penyelenggara SPBE sebagai dasar hukum pembentukan tim penyelenggara SPBE.
2. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarbaru dapat terlihat adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang baik dibuktikan dengan adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik seperti SIPD, SIMDA, SIKDA, SPSE, Simpeg, SIMAYA, SIAP BMD, aplikasi BATATA, aplikasi banjarbaru bagawi.
3. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarbaru dapat terlihat adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang baik dibuktikan dengan adanya penggunaan layanan publik berbasis elektronik seperti LAPOR, PPID, JDIH, aplikasi satu pintu INTAN BJB, aplikasi RSD Idaman, aplikasi Dukcapil Banjarbaru.

Hal yang mendorong Kegagalan capaian kinerja adalah :

1. Kelemahan Namun disisi lain, Pemerintah Kota Banjarbaru masih belum memiliki pengaturan interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data nasional pengaturan interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain serta

peraturan yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada indikator lain kebijakan yang dimiliki terlihat belum memiliki pengaturan secara lengkap terkait referensi arsitektur dan domain arsitektur SPBE pengaturan seluruh muatan Peta Rencana SPBE pengaturan dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data pengaturan proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE serta pelaksanaan Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).

2. Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE Masih belum ditemukannya bukti dukung yang memadai terkait Aspek Perencanaan Strategis SPBE, dimana bukti dukung yang diberikan masih berupa laporan akhir penyusunan master plan jaringan nirkabel dan fiber optik Pemerintah Kota Banjarbaru 2017 (tanpa tanda tangan pengesahan) belum ada bukti dokumen resmi seperti dokumen RKA/KL atau DPA SKPD resmi, SOP terkait proses penyusunan Anggaran SPBE ataupun notulensi catatan laporan hasil pembahasan penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE.
3. Masih belum ditemukannya bukti dukung yang memadai terkait Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, dimana bukti dukung yang diberikan masih belum memperlihatkan siklus pembangunan aplikasi yang runut dan lengkap (SDLC) dengan disertai bukti pendukung lainnya seperti misalnya dokumen desain sistem, dokumen konsultasi resmi/formal dengan unit pengelola TIK, notulensi rapat berisikan diskusi beserta masukan yang diberikan. Selain itu, dokumen pendukung yang diberikan masih belum memuat bukti penerapan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan disertai dengan proses reviu dan evaluasi secara periodic
4. Pelaksanaan penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Kota Banjarbaru masih sebatas pada surat keputusan tentang pembentukan tim koordinasi SPBE dan pembentukan tim asesor internal SPBE, belum ada bukti program kerja, pelaksanaan tugas, koordinasi, dan kolaborasi penerapan SPBE secara formal.

5. Masih belum ditemukannya bukti dukung yang memadai terkait penerapan manajemen SPBE. Beberapa bukti dukung yang diberikan masih berbentuk draft tidak resmi (identifikasi resiko, form daftar statistik sektoral 2021, masterplan TIK 2017), rencana kerja kominfo tanpa penjelasan perencanaan dan program kegiatan beserta anggarannya. Belum terdapat bukti dukung yang memadai seperti perencanaan kegiatan, kegiatan yang terarah ataupun pendekatan sistematis, SOP atau formal prosedur yang jelas dengan didukung bukti seperti misalnya notulen rapat, proses koordinasi, proses reuiu dan evaluasi
6. Masih belum ditemukannya bukti dukung yang memadai terkait Audit TIK pada seluruh indikator
7. Pemerintah Kota Banjarbaru masih belum memiliki bukti layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain serta bukti reuiu dan evaluasi yang cukup memadai yang kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan. Sementara khusus pada Layanan Pengawasan Internal Pemerintah belum ada dokumen pendukung yang diberikan
8. Pemerintah Kota Banjarbaru masih belum memiliki bukti kolaborasi dengan layanan elektronik lain, belum ada bukti layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain serta dengan bukti reuiu dan evaluasi yang cukup memadai yang kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan.

g. Efisiensi penggunaan sumber daya

Dukungan anggaran untuk menunjang sasaran ini berasal dari 1 (satu) program yaitu : Program Aplikasi Informatika dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran

PROGRAM/SUB KEGIATAN	Anggaran		Persentase (%)
	Pagu	Realisasi	Anggaran
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 8,760,294,300	Rp 7,978,635,978	81.85%
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 66,399,000	Rp 51,549,000	77.64%

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 5,207,909,000	Rp 4,743,155,770	91.08%
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 53,291,000	Rp 47,226,000	88.62%
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp 2,529,632,800	Rp 2,442,092,708	96.54%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 492,240,500	Rp 327,770,500	66.59%
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp 353,357,000	Rp 333,437,000	94.36%
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 57,465,000	Rp 33,405,000	58.13%

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase serapan anggaran adalah sebesar 81,85% dan nilai capaian kinerja sebesar 110%.

Sehingga efisiensi penggunaan sumbaer daya dihitung dengan menggunakan formula persentase capaian kinerja dikurangi persentase serapan anggaran sehingga diperoleh hasil 28,15%.

Sasaran 2: Meningkatnya informasi publik

Indikator : Persentase informasi publik pemerintah daerah

Metode pengukuran dilakukan dengan cara menghitung Jumlah informasi per bulan di bagi jumlah informasi setahun kali 100 persen.

Metode pengukuran dilakukan dengan cara menghitung Jumlah informasi per bulan di bagi jumlah informasi setahun kali 100 persen.

Alasan pemilihan indikator adalah karena UU Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang.

Terdapat 7 media yang digunakan untuk menyebarkan informasi publik pemerintah daerah, yaitu :

1. Media Youtube
2. Media Instagram
3. Media Twitter
4. Media Facebook
5. SMS Blast
6. Banjarbaru TV
7. Aplikasi SIP-PPID

a. Target Realisasi dan Capaian 2021

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	satuan	Uraian Kinerja Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase informasi publik pemerintah daerah	%	80	100	125%

Berdasarkan tabel 3.10 pada tahun 2021 target Persentase informasi publik pemerintah daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 125%.

Tabel 3.11 Media Yang Menyebarkan Informasi Publik Pemerintah

Daerah

No.	Media	Jumlah
1.	Media Youtube	22.829
2.	Instagram	11.6.964
3.	Twitter	196
4.	Facebook	5.844
5.	SMS Blast	306.755
6.	BanjarbaruTV	400
	Jumlah	455.361

Tabel 3.12 Media Youtube

No	Bulan	Jumlah Viewers
1.	Januari	583
2.	Februari	1.389
3.	Maret	1.891
4	April	3.367
5.	Mei	818
6	Juni	2.221
7.	Juli	615
8.	Agustus	5.279
9.	September	205
10.	Oktober	3.095
11.	November	1.032
12.	Desember	2.334
Total		22.829

Tabel 3.13 Media Instagram

No	Bulan	Jumlah Viewers
1.	Januari	15.786
2.	Februari	4.787
3.	Maret	13.586
4	April	8.042
5.	Mei	14.923
6	Juni	11.548
7.	Juli	23.803
8.	Agustus	12.176
9.	September	1.173
10.	Oktober	3.716
11.	November	3.986
12.	Desember	3.438

Total	116.964
--------------	----------------

Tabel 3.14 Twiter

No	Bulan	Jumlah Viewers
1.	Januari	-
2.	Februari	-
3.	Maret	-
4	April	-
5.	Mei	1
6	Juni	-
7.	Juli	-
8.	Agustus	175
9.	September	-
10.	Oktober	17
11.	November	-
12.	Desember	3
Total		196

Tabel 3.15 Media Facebook

No	Bulan	Jumlah Viewers
1.	Januari	841
2.	Februari	792
3.	Maret	1.907
4	April	28
5.	Mei	1.006
6	Juni	54
7.	Juli	43
8.	Agustus	221
9.	September	30
10.	Oktober	163
11.	November	199
12.	Desember	560

Total	5.844
--------------	--------------

Tabel 3.16 Banjarbaru TV

No	Bulan	Jumlah Berita
1.	Januari	33
2.	Februari	33
3.	Maret	33
4	April	33
5.	Mei	33
6	Juni	33
7.	Juli	33
8.	Agustus	33
9.	September	33
10.	Oktober	33
11.	November	35
12.	Desember	35
Total		400

b. Perbandingan 3 tahun terakhir

Tabel 3.17 Perbandingan Kinerja Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	2019		2020		2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase informasi publik pemerintah daerah	Na	Na	Na	Na	100%	125%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator Persentase informasi publik yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena memiliki indikator kinerja yang berbeda.

c. Perbandingan dengan RPJMD dan Nasional

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target RPJMD	Target Nasional
1.	Persentase informasi publik pemerintah daerah	100%	80%	-

Dengan memperhatikan realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 100% dan capaian pada tahun 2021 sebesar 125%, maka target RPJMD tahun 2021 melebihi 45 % untuk target Nasional tidak dapat dibandingkan dengan Nasional. Hal ini disebabkan karena memiliki indikator kinerja yang berbeda.

d. Perbandingan dengan Provinsi

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target Provinsi Tahun 2021
1.	Persentase informasi publik pemerintah daerah	100%	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator Persentase informasi publik pemerintah daerah tidak dapat dibandingkan dengan Provinsi Kalsel. Hal ini disebabkan karena memiliki indikator kinerja yang berbeda.

e. Perbandingan dengan Kab/Kota Sekitar

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kab/Kota Sekitar

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kabupaten Banjarmasin
1.	Persentase informasi publik pemerintah daerah	100%	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator Persentase informasi publik pemerintah daerah tidak dapat dibandingkan dengan Provinsi Kalsel. Hal ini disebabkan karena memiliki indikator kinerja yang berbeda.

f. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dalam pemenuhan penilaian Indikator kinerja ini disebabkan faktor beberapa faktor sbb :

1. Telah tersedianya media akses Informasi Publik, seperti Media Sosial (Youtube, IG, Twitter, FB), SMS Blast, BanjarbaruTV, Aplikasi SIP-PPID
2. Telah adanya peraturan yang jelas tentang prosedur layanan informasi publik
3. Telah terbentuk PPIDP pada unit kerja beserta admin SIP-PPID yang memudahkan unit kerja dalam menyampaikan dokumen informasi publik.
4. Telah terbentuknya KIM di semua kelurahan
5. Membuat jadwal publikasi informasi secara berkala ke media informasi yang dimiliki.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian kinerja disebabkan karena :

1. Minimnya sarana dan prasarana, serta pendanaan.
2. Secara kualitas, informasi yang disampaikan masih kurang karena dokumen informasi yang disampaikan banyak yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Masih ada beberapa unit kerja yang adminnya tidak aktif
4. Masyarakat masih kurang paham atas hak mereka dalam mendapatkan informasi

6. Operator website pada KIM masih belum aktif dalam mendiseminasikan informasi dari Pemerintah Daerah/Pusat
7. Penyesuaian aktifitas dalam menghadapi Wabah Virus Covid-19.

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dukungan anggaran untuk menunjang sasaran ini berasal dari program yaitu : Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran

PROGRAM/SUB KEGIATAN	Anggaran		Persentase (%)
	Alokasi	Realisasi	Anggaran
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 1,133,740,500	Rp 1,071,178,399	96.52%
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp 86,772,000	Rp 86,362,000	99.53%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 367,199,000	Rp 334,755,199	91.16%
Pelayanan Informasi Publik	Rp 52,129,000	Rp 51,317,000	98.44%
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 145,363,000	Rp 144,213,000	99.21%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp 482,277,500	Rp 454,531,200	94.25%

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase serapan anggaran adalah sebesar 96,52% dan nilai capaian kinerja pada sasaran ini adalah 125%.

Sehingga efisiensi penggunaan sumber daya dihitung dengan menggunakan formula persentase capaian kinerja dikurangi persentase serapan anggaran sehingga diperoleh hasil 28,48%.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral

Indikator : Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Alasan pemilihan indikator adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Meningkatnya kualitas layanan data setiap tahun tak lepas dari peran aktif produsen data (SKPD) dalam menyampaikan data sektoral, pembina data (BPS) dan walidata (Diskominfo).

a. Target Realisasi dan Capaian 2021

Tabel 3.22 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	satuan	Uraian Kinerja Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	70	73	104

Berdasarkan tabel 3.22 pada tahun 2021 target Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan target 70%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 104%.

Tabel 3.23 Daftar SKPD yang menggunakan Data Statistik Sektoral

No.	Daftar skpd yang menggunakan data statistik sektoral
1.	Dinas perumahan dan pemukiman
2.	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerjaan
3.	Dinas pendidikan
4.	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

5.	Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah
6	Badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah
7.	Satuan polisi pamong praja
8	Dinas arsip dan perpustakaan daerah
9	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
10	Dinas sosial
11	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
12	Dinas lingkungan hidup
13	Dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan
14	Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
15	Dinas perdagangan
16	Badan penanggulangan bencana daerah
17	Dinas pengendalian penduduk, kb, pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak
18	Dinas kesehatan
19	Badan pengolahan keuangan dan aset daerah

b. Perbandingan Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Tahun 2019, Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2019		Realisasi 2020		Realisasi 2021	
		Realisasi	Capaian	Reliasai	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Na	Na	Na	Na	73%	104%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data

statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena memiliki indikator kinerja yang berbeda.

c. Perbandingan dengan RPJMD dan Nasional

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target RPJMD	Target Nasional
1.	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	73%	70%	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sudah mencapai RPJMD. Dan untuk target Nasional tidak dapat dibandingkan hal ini disebabkan karena memiliki indikator kinerja yang berbeda.

d. Perbandingan dengan Provinsi

Tabel 3.26 Perbandingan dengan Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target Provinsi Tahun 2021
1.	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	73%	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data

statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tidak bisa dibandingkan dengan Target Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena memiliki indikator kinerja yang berbeda.

e. Perbandingan dengan Kab/Kota Sekitar

Tabel 3.27 Perbandingan dengan Kab/Kota Sekitar

No. B	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kabupaten Banjarmasin
1.e r d	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	73%	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tidak bisa dibandingkan dengan Target Perbandingan dengan Kab/Kota Sekitar. Hal ini disebabkan karena memiliki indikator kinerja yang berbeda.

f. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Analisis Keberhasilan :

- Program penyelenggaraan statistik sektoral Daerah di Kota Banjarbaru berjalan dengan baik, data statistik sektoral terupdate setiap tahun yang dipublis dalam bentuk buku statistik sektoral kota Banjarbaru dan website diskominfo.
- Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah adalah persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mana pada tahun 2021 capaiannya sebesar 73% atau 4,3% diatas target renstra sebesar 70%. Besaran persentase tersebut diperoleh dari jumlah OPD

yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan dibagi jumlah OPD (tidak termasuk kecamatan dan OPD penyelenggara).

4. Meningkatnya kualitas layanan data setiap tahun tak lepas dr peran aktif produsen data (SKPD)dalam menyampaikan data sektoral, pembina data (BPS) dan walidata (Diskominfo).
5. Agar kualitas data statistik sektoral meningkat setiap tahunnya selain terupdate dan akurat, juga dilakukan upaya penambahan pembendaharaan jenis data sektoral sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan.

Analisis Kegagalan :

1. Kegiatan penyelenggaraan statistik daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung serta peran aktif dari penyelenggara statistik daerah (produsen data, pembina data dan walidata).
2. Untuk meningkatkan kualitas /mutu penyelenggaraan statistik daerah perlu didukung oleh SDM yg berkompeten dibidang statistik.

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dukungan anggaran untuk menunjang sasaran ini berasal dari 1 (satu)

Program yaitu : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Tabel 2.28 Realisasi Anggaran

PROGRAM/SUB KEGIATAN	Anggaran		Persentase (%)
	Alokasi	Realisasi	Anggaran
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 112,981,500	Rp. 111,181,500	98.91%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 30,660,500	Rp 30,660,500	100.00%

Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp 82,321,000	Rp 80,521,000	97.81%
---------------------------------------	---------------	---------------	--------

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase serapan anggaran adalah sebesar 98,91% dan nilai capaian kinerja pada sasaran ini adalah 104%.

Sehingga efisiensi penggunaan sumber daya dihitung dengan menggunakan formula persentase capaian kinerja dikurangi persentase serapan anggaran sehingga diperoleh hasil 5,09%.

❖ **Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi**

Indikator : Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disrupti pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama.

Berdasarkan Perpres No. 53 Tahun 2017 jo Perpres No. 133 Tahun 2017 tentang BSSN, Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Permenkominfo Nomor 4 tahun 2016 tentang sistem manajemen pengamanan informasi, perka lemsaneg nomor 7 tahun 2017 tentang pendoman penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kab/kota, peraturan BSSN nomor 2 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja BSSN, peraturan BSSN no 5 tahun 2018 tentang rencana strategis BSSN dan Peraturan BSSN no 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi.

Perhitungannya adalah Jumlah nilai per area keamanan informasi per Jumlah area keamanan dikalikan seratus persen.

a. Target Realisasi dan Capaian 2021

No	Indikator Kinerja	satuan	Uraian Kinerja Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	30%	46,87%	156,23%

Tabel 3.29 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.20 pada tahun 2021 target Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dengan target 30%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 156,23%.

Ruang lingkup penilaian Indeks Kematangan Keamanan Informasi Tahun 2021

Indeks Kematangan Keamanan Informasi Tahun 2021 :

Ruang lingkup penilaian :

- 1 Tata Kelola
- 2 Pengelolaan Resiko
- 3 Kerangka Kerja
- 4 Pengelolaan Aset
- 5 Teknologi
- 6 Penanggulangan dan Pemulihan

Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di masing-masing area di bawah ini: *(Data terlampir)*

Bagian I :	Kategori Sistem Elektronik	Skor penetapan Kategori Sistem Elektronik	24
	Menunjukkan Status Kategori Sistem Elektronik		TINGGI

Catatan : Adapun korelasi antara Kategori Sistem Elektronik dengan Status Kesiapan didefinisikan melalui tabel *(terlampir)*

Bagian II:	Tata Kelola Keamanan Informasi	Total Nilai Evaluasi Tata Kelola	47
Bagian III:	Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	Total Nilai Evaluasi Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	24
Bagian IV:	Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi	Total Nilai Evaluasi Kerangka Kerja	101
Bagian V:	Pengelolaan Aset Informasi	Total Nilai Evaluasi Pengelolaan Aset	89
Bagian VI:	Teknologi dan Keamanan Informasi	Total Nilai Evaluasi Teknologi dan Keamanan Informasi	81
	Jumlah Nilai Per Area Keamanan Informasi		342
Bagian VII:	Suplemen : (Penanggulangan dan Pemulihan)		
-	Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga	67%	
-	Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan	67%	
-	Perlindungan Data Pribadi	50%	

Catatan : Adapun proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di masing-masing area *(data terlampir)*

Gambar 3.1 Ruang Indeks Kematangan Keamanan Informasi Tahun 2021

Dengan membaca diagram ini, pimpinan instansi dapat melihat kebutuhan pembenahan yang diperlukan dan korelasi antara berbagai area penerapan keamanan informasi. Adapun korelasi antara Kategori Sistem Elektronik dengan Status Kesiapan didefinisikan melalui tabel berikut:

KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK				
Rendah		Skor Akhir		Status Kesiapan
10	15	0	174	Tidak Layak
		175	312	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		313	535	Cukup Baik
		536	645	Baik
Tinggi		Skor Akhir		Status Kesiapan
16	34	0	272	Tidak Layak
		273	455	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		456	583	Cukup Baik
		584	645	Baik
Strategis		Skor Akhir		Status Kesiapan
35	50	0	333	Tidak Layak
		334	535	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		536	609	Cukup Baik
		610	645	Baik

Pengelompokan kedua dilakukan berdasarkan tingkat **kematangan** penerapan pengamanan dengan kategorisasi yang mengacu kepada tingkatan kematangan yang digunakan oleh kerangka kerja COBIT atau CMMI. Tingkat kematangan ini nantinya akan digunakan sebagai alat untuk melaporkan pemetaan dan pemeringkatan kesiapan keamanan informasi di Kementerian/Lembaga.

Gambar 3.2 Tingkat Penerapan Pengamanan

b. Perbandingan Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Tahun 2019, Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019		Realisasi 2020		Realisasi 2021	
		Realisasi	Capaian	Reliasai	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Na	Na	Na	Na	46,87%	156,23%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah tidak dapat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena memiliki indikator kinerja yang berbeda

c. Perbandingan dengan RPJMD dan Nasional

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi dengan RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional Tahun 2021
1.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	46,87%	30%	30%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah melampaui target RPJMD yaitu 46,87% sedangkan untuk target Nasional tidak dapat dibandingkan hal ini disebabkan karena memiliki indikator kinerja yang berbeda.

d. Perbandingan dengan Provinsi

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi dengan Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target Provinsi Tahun 2020
1.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	46,87%	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah tidak dapat dibandingkan dengan Target Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena memiliki indikator kinerja yang berbeda.

e. Perbandingan dengan Kab/Kota Sekitar

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi dengan Kab/Kota Sekitar

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kabupaten Banjarmasin
1.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	46,87%	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah tidak dapat dibandingkan dengan Kab/Kota sekitar. Hal ini disebabkan karena memiliki indikator kinerja yang berbeda

f. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Analisis Keberhasilan :

Hal yang mendorong keberhasilan capaian kinerja adalah:

1. Pada ruang lingkup penilaian tata kelola keamanan informasi ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program keamanan informasi yang tercantum dalam tugas dan fungsi dalam Dinas Komunikasi dan Informatika urusan persandian tercantum dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017, menerapkan pelaksanaan sosialisasi/literasi terkait keamanan informasi dan mengikuti peningkatan kompetensi dalam rangka penyelenggaraan

persandian dalam rangka keamanan informasi bagi pejabat ataupun pengelola keamanan informasi.

2. Pada ruang lingkup penilaian pengelolaan resiko keamanan informasi masih dalam tahap perencanaan.
3. Pada ruang lingkup penilaian kerangka kerja ini dapat dilihat adanya strategi penerapan keamanan informasi telah diterapkan dapat dilihat dengan pelaksanaan pemanfaatan sertifikat elektronik yaitu pemanfaatan tanda tangan elektronik.
4. Pada ruang lingkup penilaian pengelolaan aset informasi ini dapat dilihat adanya pelaksanaan klasifikasi aset informasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pada ruang lingkup penilaian teknologi dan keamanan informasi dapat terlihat adanya penggunaan layanan internet yang telah difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang diamankan, dengan pembagian jalur akses khusus di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru, pelaksanaan identifikasi kerentanan dan penilaian resiko keamanan sistem elektronik dan menerapkan pengamanan untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan akses jaringan yang tidak resmi.
6. Pada ruang lingkup penilaian penanggulangan dan pemulihan dalam tahap perencanaan.

Hal yang mendorong Kelemahan capaian kinerja adalah :

1. Kelembagaan pelaksanaan urusan persandian yang belum memadai, tidak sesuainya pelaksanaan hasil pemetaan urusan persandian. Level kelembagaan pelaksana urusan pemerintahan urusan persandian memiliki kecenderungan turun grade sehingga berpengaruh terhadap kinerja pelaksana urusan persandian.
2. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang karena masih perlu banyak mengikuti bimtek, workshop, seminar dan/atau focus group discussion untuk pengelola sistem elektronik dan pengelola keamanan informasi dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur.
3. Ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang menangani keamanan informasi masih rendah.

4. Budaya kesadaran keamanan informasi masih beragam dan relatif rendah dilingkungan pemerintah Kota Banjarbaru.

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dukungan anggaran untuk menunjang sasaran ini berasal dari program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan jumlah anggaran Rp. 181.367.000 dan terealisasi Rp.151.350.000 atau 83,44%.

Tabel 3.34 Realisasi Anggaran

PROGRAM/SUB KEGIATAN	Anggaran		Persentase (%)
	Alokasi	Realisasi	Anggaran
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 181,367,000	Rp. 151,350,000	58.18%
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 31,038,500	Rp 6,133,500	19.76%
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 150,328,500	Rp 145,216,500	96.60%

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase serapan anggaran adalah sebesar 83,44% dan nilai capaian kinerja pada sasaran ini adalah 176,73%.

Sehingga efisiensi penggunaan sumber daya dihitung dengan menggunakan formula persentase capaian kinerja dikurangi persentase serapan anggaran sehingga diperoleh hasil 93,29%.

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1 Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai Aspek SPBE	2	2,2	110%
Meningkatnya informasi publik	Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah	80%	100%	125%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	70%	73%	104%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	30%	53,02%	176,73%

4.2. Langkah di masa akan datang

Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Untuk itu, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu :

- Peningkatan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, melalui : (i) Pelibatan seluruh pimpinan secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, (ii) Melakukan assesmen dan pengembangan kompetensi pegawai secara menyeluruh, (iii) meningkatkan proses bisnis kegiatan utama sesuai dengan tugas dan fungsi, dijabarkan dalam SOP yang

disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi.

- b. Peningkatan kualitas layanan publik melalui penyajian secara transparan tindaklanjut pengaduan pelayanan dari masyarakat serta menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan secara menyeluruh.

Akhirnya, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance).